



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (Lima) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra disusun berdasarkan hasil sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran, dan program Dinas Kominfo dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Jombang memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan pelaksana di lingkungan Dinas Kominfo untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mewujudkan Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2025-2029 yaitu "Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik."

Akhirnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Jombang sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan untuk Lima tahun kedepan (2025 - 2029) serta menjadi komitmen segenap pegawai dilingkup Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menjadi lebih baik.

Jombang, 09 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI, S.STP.,M.KP
Pembina Tingkat I

NIP. 198005281999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	17
2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	25
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	45
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	46
2.2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	52
2.2.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	59
2.2.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
3.1 TUJUAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	67
3.2 SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	67
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029.....	69
3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB V PENUTUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan yang dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Renstra Perangkat Daerah.

Rencana strategis organisasi perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran setiap perangkat daerah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah guna menjabarkan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Sinkronisasi dan Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program PD, dengan Tujuan

dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra PD adalah rancangan awal yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama 5 (lima) tahun baik untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD.

Renstra kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Renstra PD. Jika capaian Renstra PD melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja PD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan RPJMD serta menjadi arahan serta acuan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

b. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan renstra adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan dan sasaran

pembangunan untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo;

2. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan;
3. Menentukan ukuran keberhasilana (indikator kinerja) penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target capaiannya selama priode perencanaan, yaitu tahun 2025-2029
4. Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian;
5. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Dasar Hukum Penyusunan
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.3 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.2.4 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian dan Sub Koordinasi & Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- 3) Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dengan Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
- 4) Bidang Aplikasi Informatika dengan Sub Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- 5) Bidang Statistik dan Persandian dengan Sub Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Jabatan Fungsional Stasi Ahli Muda
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda

Adapun Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
 - a) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e) Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika; bidang statistik dan bidang persandian;
- f) Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e) Pengelolaan aset;
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i) Pengelolaan kearsipan;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan

- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
 - b) Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
 - c) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
 - d) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
 - e) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas;
 - f) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
 - g) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;
 - h) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pemubukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - b) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
 - c) Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
 - d) Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang- barang inventaris kantor;

- e) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- Perencana Ahli Muda, mempunyai tugas :
- a) Memformulasikan sajian untuk analisis;
 - b) Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - c) Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d) Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - e) Menguji alternatif kriteria dan model;
 - f) Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - g) Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - h) Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - i) Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - j) Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - k) Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
 - l) Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
6. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
- Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang Hubungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, mempunyai fungsi:
- a) Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi

- publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
 - c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
 - e) Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;
 - f) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak), radio, televisi dan film;
 - g) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah, lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;

- h) Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
- i) Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
- j) Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k) Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Jabatan Fungsional Pranata Humas

Fungsional Pranata Humas, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
- b) Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
- c) Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
- d) Mengolah isu publik;
- e) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah;
- f) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk presentasi;
- g) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pidato;
- h) Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi dan kehumasan;
- i) Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat rutin;
- j) Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat berkala;
- k) Mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan;
- l) Mengolah isu hubungan internal;
- m)Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers sebagai moderator;
- n) Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi dengan pemangkukepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai moderator;

- o) Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta;
 - p) Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - q) Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
 - r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.
8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika
- Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e- Government. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai fungsi:
- a) Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e- Government;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e- Government;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e- Government;
 - e) Pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government; dan
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Jabatan Fungsional Paranata Komputer
- Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a) melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
 - b) mengelola kebutuhan layanan teknologi;
 - c) mengelola portofolio layanan teknologi informasi;
 - d) mengelola kapasitas layanan teknologi informasi;
 - e) mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi;
 - f) mengelola pengetahuan layanan teknologi;
 - g) melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi
 - h) menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur
 - i) melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data;
 - j) melakukan analisis kebutuhan informasi;
 - k) menyusun rencana backup dan pemulihan data;
 - l) menyusun kebutuhan teknologi data;
 - m) melakukan analisis sistem informasi;
 - n) melakukan pemantauan (monitoring) kinerja
 - o) menyusun skenario uji coba sistem informasi;
 - p) melakukan pemantauan (monitoring) pengolahan
10. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
- Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Statistik dan Persandian, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

11. Jabatan Fungsional Statisi Ahli Muda

Fungsional Statisi Ahli Muda mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan validasi data hasil entri;
- b. Melakukan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan data;
- c. Melakukan proses integrasi raw data hasil kegiatan pengumpulan data;
- d. Menyusun materi metodologi Kegiatan Statistik pada bahan publikasi Statistik;
- e. Menyusun leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil kegiatan Statistik;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

12. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda

Fungsional Sandiman Ahli Muda mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

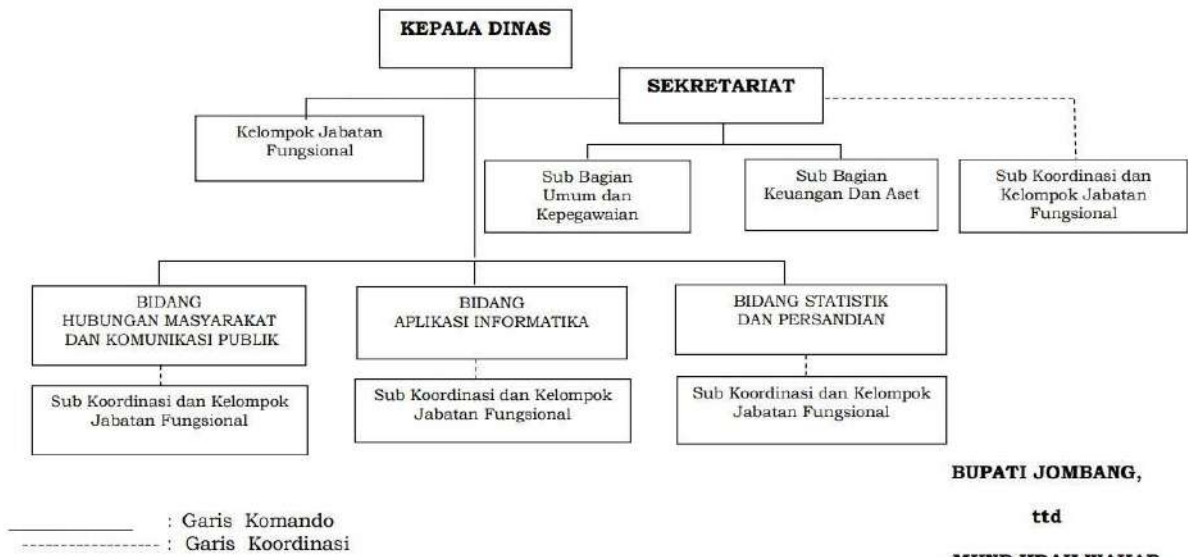
- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang Keamanan Informasi, Keamanan Siber dan Persandian;
- b. Melakukan supervise audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- c. Melakukan penilaian keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- d. Melakukan audit keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- e. Melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- f. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi; keamanan siber dan persandian

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 - 2029

13

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 76 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG



2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebanyak 57 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian:

No	Status	Jumlah
1	PNS	28
2	PPPK	6
3	NON ASN	9
4	Tenaga Ahli Programmer	8
5	Tenaga Call Center 112	6
	Jumlah	57

b. Komposisi Pendidikan ASN

No.	Pendidikan PNS	Jumlah
1	SMP	0
2	SMA/ SMK	5
3	D1/D2/D3	5
4	S1	18
5	S2	6
6	S3	0
	Jumlah	34 orang

c. Komposisi Pendidikan NON ASN :

No.	Pendidikan Pegawai Non ASN	Jumlah
1	SD	0 orang
2	SMP	0 orang
3	SMA/ SMK	3 orang
4	D1/D2/D3	0 orang
5	S1	5 orang
6	S2	1 orang
	Jumlah	9 orang

No.	Tenaga Ahli Programmer dan Tenaga Call Center	Jumlah
1	SD	0 orang
2	SMP	0 orang
3	SMA/ SMK	0 orang
4	D1/D2/D3	1 orang
5	S1	13 orang
6	S2	0 orang
	Jumlah	14 orang

d. Komposisi ASN Menurut Gender

No.	ANS Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	18 orang
2	Perempuan	16 orang
	Jumlah	34 orang

e. Komposisi Pegawai Non ASN Menurut Gender

No.	Non ASN Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	7 orang
2	Perempuan	2 orang
	Jumlah	9 orang

f. Komposisi Umur Tenaga Ahli Programmer dan Tenaga Call Center Menurut Gender

No.	Pegawai Tenaga Ahli Programmer dan Tenaga Ahli Call Center Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	13 orang
2	Perempuan	1 orang
	Jumlah	14 orang

Asset yang dikelola Dinas Kominfo meliputi :

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
01.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2
02.01.03.04.002	2	Portable Generating Set	0
02.02.01.01.003	3	Station Wagon	5
02.02.01.01.005	4	Sport Utility Vehicle (SUV)	1
02.02.01.03.001	5	Truck + Attachment	1
02.02.01.04.001	6	Sepeda Motor	14
02.03.01.02.002	7	Mesin Bor Tangan	1
02.05.01.01.008	8	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1
02.05.01.04.001	9	Lemari Besi/Metal	6
02.05.01.04.002	10	Lemari Kayu	7
02.05.01.04.003	11	Rak Besi	5
02.05.01.04.004	12	Rak Kayu	3
02.05.01.04.005	13	Filing Cabinet Besi	10
02.05.01.04.027	14	Lemari Kaca	2
02.05.01.05.003	15	Papan Visual/Papan Nama	3
02.05.01.05.010	16	Alat Penghancur Kertas	2
02.05.01.05.012	17	Mesin Absensi	2
02.05.01.05.040	18	Penangkal Petir	22
02.05.01.05.047	19	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1
02.05.01.05.077	20	Papan Pengumuman	1
02.05.01.05.088	21	Alat Kantor Lainnya	7

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
02.05.02.01.002	22	Meja Kerja Kayu	16
02.05.02.01.005	23	Sice	1
02.05.02.01.008	24	Meja Rapat	4
02.05.02.01.017	25	Meja Panjang	1
02.05.02.01.024	26	Meja 1/2 Biro	27
02.05.02.01.030	27	Kursi Rapat	27
02.05.02.01.032	28	Kursi Putar	47
02.05.02.01.033	29	Kursi Biasa	114
02.05.02.01.035	30	Bangku Tunggu	1
02.05.02.01.039	31	Meja Komputer	4
02.05.02.01.048	32	Sofa	4
02.05.02.01.050	33	Meubeleur lainnya	2
02.05.02.03.001	34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
02.05.02.04.001	35	Lemari Es	1
02.05.02.04.003	36	A.C. Window	1
02.05.02.04.004	37	A.C. Split	44
02.05.02.04.006	38	Kipas Angin	2
02.05.02.04.007	39	Exhause Fan	5
02.05.02.05.008	40	Kitchen Set	4
02.05.02.05.026	41	Alat Dapur lainnya	4
02.05.02.06.001	42	Radio	78
02.05.02.06.002	43	Televisi	18

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
02.05.02.06.007	44	Loudspeaker	1
02.05.02.06.008	45	Sound System	25
02.05.02.06.009	46	Compact Disc	1
02.05.02.06.011	47	Karaoke	1
02.05.02.06.014	48	Microphone	15
02.05.02.06.015	49	Microphone Floor Stand	5
02.05.02.06.036	50	Tangga Aluminium	1
02.05.02.06.038	51	Dispenser	2
02.05.02.06.048	52	Handy Cam	2
02.05.02.06.059	53	Gordyin/Kray	3
02.05.02.07.001	54	Alat Pemadam/Portable	4
02.05.03.01.004	55	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
02.05.03.01.005	56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
02.05.03.01.006	57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17
02.05.03.01.009	58	Meja Kerja Pejabat lain- lain	2
02.05.03.02.004	59	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
02.05.03.02.014	60	Meja Rapat Pejabat lainnya	2
02.05.03.03.004	61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
02.05.03.03.005	62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
02.05.03.03.006	63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
02.05.03.03.009	64	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2
02.05.03.06.002	65	Kursi Tamu di Ruang Eselon I/Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
02.05.03.07.007	66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
02.05.03.07.009	67	Buffet Kaca	6
02.06.01.01.002	68	Audio Mixing Portable	1
02.06.01.01.005	69	Audio Amplifier	1
02.06.01.01.007	70	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1
02.06.01.01.014	71	Audio Catridge Recorder	2
02.06.01.01.022	72	Telephone Hybrid	1
02.06.01.01.036	73	Microphone/Wireless MIC	8
02.06.01.01.038	74	Microphone Connector Box	8
02.06.01.01.048	75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
02.06.01.01.078	76	Microphone Cable	2
02.06.01.01.096	77	peralatan studio audio lainnya (dst)	13
02.06.01.02.003	78	Camera Electronic	19
02.06.01.02.012	79	Video Monitor	2
02.06.01.02.015	80	Video Mixer	2
02.06.01.02.045	81	Tripod Camera	2
02.06.01.02.061	82	Lensa Kamera	6
02.06.01.02.074	83	Mixer PVC	5
02.06.01.02.105	84	Layar Film/Projector	5
02.06.01.02.116	85	Head Set	2
02.06.01.02.126	86	Camera Digital	4
02.06.01.02.130	87	Video Conference	3

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
02.06.01.02.133	88	LCD Monitor	1
02.06.01.02.156	89	Monopod	2
02.06.01.02.163	90	Camera Conference	1
02.06.01.02.164	91	Alat Studio Video Lainnya	20
02.06.01.05.035	92	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
02.06.01.05.053	93	Alat Studio Pemetaan lainnya	1
02.06.02.01.004	94	Telephone Mobile	4
02.06.02.01.006	95	Handy Talky (HT)	10
02.06.02.01.010	96	Facsimile	1
02.06.02.03.005	97	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	13
02.06.03.03.001	98	Unit Pemancar VHF/FM Portable	2
02.06.03.03.004	99	peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	3
02.06.03.08.004	100	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	3
02.06.03.09.001	101	Antene UHF Portable	3
02.06.03.20.002	102	Guy Tower	1
02.06.03.20.004	103	Concrete Tower	1
02.06.03.20.005	104	switcher/menara antena lainnya (dst)	38
02.09.02.01.010	105	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1
02.10.01.02.001	106	P.C Unit	113
02.10.01.02.002	107	Lap Top	18
02.10.01.02.003	108	Note Book	33
02.10.02.01.012	109	Hard Disk	7

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
02.10.02.03.002	110	Monitor	1
02.10.02.03.003	111	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36
02.10.02.03.004	112	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
02.10.02.03.005	113	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1
02.10.02.03.007	114	External	9
02.10.02.03.017	115	External/ Portable Hardisk	3
02.10.02.03.018	116	Peralatan Personal Komputer lainnya	189
02.10.02.04.001	117	Server	47
02.10.02.04.002	118	Router	105
02.10.02.04.003	119	Hub	103
02.10.02.04.004	120	Modem	1
02.10.02.04.005	121	Netware Interface External	315
02.10.02.04.024	122	Switch	5
02.10.02.04.026	123	Acces Point	20
02.10.02.04.027	124	Rackmount	2
02.10.02.04.033	125	Peralatan Jaringan lainnya	104
02.10.02.05.001	126	Peralatan Komputer lainnya	1
03.01.01.01.001	127	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4
03.01.01.13.001	128	Gedung Pos Jaga Permanen	1
03.01.01.14.001	129	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
03.01.01.37.001	130	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1
03.03.01.03.002	131	Bangunan Menara Radio	1
04.03.06.02.002	132	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	6

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024
04.03.06.03.004	133	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1
04.04.02.02.003	134	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1
04.04.02.02.004	135	Jaringan Distribusi Lain- lain	1
04.04.03.01.004	136	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	3

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perubahan regulasi yaitu :

1. Perubahan nomenklatur program sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2020 mengalami perubahan program dan kegiatan, sedangkan tahun 2021, nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan mengalami perubahan yang disesuaikan indikator dan target pusat .
2. Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi,kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada rencana kerja tahun 2023 terdapat perubahan indikator sub kegiatan yang ditetapkan oleh kemendagri sesuai dengan Kepmendagri 050- 5889 tahun 2021.
3. Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Keputusan ini mengatur tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada rencana kerja tahun 2024 terdapat lagi perubahan indikator sub kegiatan sesuai Permendagri

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

4. Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :
 - a. Fasilitasi Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Fasilitasi Permohonan Informasi Publik (PPID);
 - d. Fasilitasi Pengurusan Tanda Tangan Elektronik;
 - e. Fasilitasi Data Statistik Sektoral;
 - f. Fasilitasi Call Center 112 Jombang Siaga;
 - g. Fasilitasi Pengaduan SP4N-LAPOR!;
 - h. Fasilitasi Layanan Publikasi Radio Suara Jombang
5. Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama dan Pencapaian Kinerja Pelayanan ditampilkan sebagai berikut :

TABEL 2. 1.3 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	1,8 (cukup)	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6 (kurang)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,89	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	83,5	8,4	84,5 (baik)	n/a	n/a	85,81	86,48	87,32	n/a	n/a	97,30	102,95	103,33	n/a
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	3,51	3,52	3,53	n/a	n/a	3,164	2,35	3,45	n/a	n/a	90,19	66,76	97,73	n/a
3	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan Informatika	n/a	18 indikator	8 indikator	2,63	n/a	n/a	18 indikator	8 indikator	2,63	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	n/a	78 (BB)	79 (BB)	80 (AA)	n/a	n/a	80,11	80,01	80,13	n/a	n/a	97,37	101,28	100,16	n/a
5	Meningkatkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	n/a	n/a	n/a	n/a	66 (sedang)	n/a	n/a	n/a	n/a	67,17	n/a	n/a	n/a	n/a	101,8

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
	Komunikasi Publik	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I- KTIK)	n/a	n/a	n/a	n/a	Level 3	n/a	n/a	n/a	n/a	Level 3	n/a	n/a	n/a	n/a	100%
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	n/a	n/a	n/a	n/a	2,75 (terkelola)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,75	n/a	n/a	n/a	n/a	100%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,2 (terkelola)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,26	n/a	n/a	n/a	n/a	102,7
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	n/a	n/a	n/a	n/a	290 (tinggi)	n/a	n/a	n/a	n/a	612	n/a	n/a	n/a	n/a	211
		Nilai Evaluasi AKIP PD	n/a	n/a	n/a	n/a	80,05	n/a	n/a	n/a	n/a	79,19	n/a	n/a	n/a	n/a	98,9

TABEL TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
1	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				22 jenis					22 jenis					100%				
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100%					100%					100%				
3	Jumlah / jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan				8 jenis					8 jenis					100%				
4	Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan dan perlengkapan gedung kantor				2 gedung					2 gedung					100%				
5	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				100 unit					100 unit					100%				
6	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara				15 unit					15 unit					100%				
7	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya				165 stel					165 stel					100%				
8	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100%					100%					100%				
9	Jumlah dokumen rencana kerja OPD tahunan sebagai rencana/program kegiatan SKPD				100%					100%					100%				
10	Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD				2 dokumen					2 dokumen					100%				
11	Jumlah laporan keuangan OPD tepat waktu				1 dokumen					1 dokumen					100%				
Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik																			
12	Persentase informasi ketentuan perundangundangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan				100%					100%					100%				
13	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan dibidang cukai				400 orang					400 orang					100%				
14	Persentase publikasi kegiatan pembangunan; Kategori predikat PPID; Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa				100%					100%					100%				
15	Jumlah dialog interaktif melalui media elektronik				24 kegiatan					5 kegiatan					100%				
16	Radius jangkauan layanan siaran radio di Kabupaten Jombang				10 km					20 km					100%				
17	Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan pelatihan lapor SP4N				75 OPD					75 OPD					100%				
18	Jumlah KIM yang terbentuk di setiap desa				5 desa					0 desa					100%				
19	Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik				100%					100%					100%				
20	1)Persentase OPD yang ditingkatkan kualitas dan layanan koneksi pengembangan jaringan				68%					68%					100%				
21	(2) Jumlah penambahan titik koneksi jaringan diarea publik				10 titik					10 titik					100%				
22	Persentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara				100%					100%					100%				

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
23	Jumlah data center yang terbentuk				1 data center					2 data center					100%				
24	Jumlah data aplikasi yang terintegrasi				3 jenis					3 jenis					100%				
25	Persentase sistem aplikasi online				100%					100%					100%				
26	Jumlah aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain Jombangkab.go.id				7 subdomain					19 subdomain					100%				
27	Jumlah dokumen konsultasi				1 dokumen					1 dokumen					100%				
28	Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan				100%					100%					100%				
29	Jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang				2 dokumen					2 dokumen					100%				
30	Persentase informasi yang dilakukan pengamanan				100%					100%					100%				
31	Jumlah komunikasi berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima				396 berita					412 berita					100%				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
42	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	200%			100%	100%	200%			100%	100%	100%	
43	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan					100%	100%	200%			100%	100%	200%			100%	100%	100%	
44	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun					3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen			100%	100%	100%	
45	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun					5 laporan	5 laporan	10 laporan			5 laporan	5 laporan	10 laporan			100%	100%	100%	
46	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu					100%	100%	200%			100%	100%	200%			100%	100%	100%	
47	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi					14 kali	14 kali	28kali			14 kali	14 kali	28kali			100%	100%	100%	
48	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan					11 kegiatan	11 kegiatan	22 kegiatan			11 kegiatan	11 kegiatan	22 kegiatan			100%	100%	100%	
49	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen			100%	100%	100%	
50	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah					100%	100%	200%			100%	100%	200%			100%	100%	100%	
51	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai					450 orang	450 orang	900 orang			450 orang	450 orang	900 orang			100%	100%	100%	
52	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	200%			100%	100%	200%			100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
53	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi					3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			100%	100%	100%	
54	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi					3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			100%	100%	100%	
55	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi					2 jenis	2 jenis	4 jenis			2 jenis	2 jenis	4 jenis			100%	100%	100%	
56	Jumlah pemenuhan barang cetak					4 jenis	4 jenis	8 jenis			4 jenis	4 jenis	8 jenis			100%	100%	100%	
57	Jumlah pemenuhan barang penggandaan					1 jenis	1 jenis	2 jenis			1 jenis	1 jenis	2 jenis			100%	100%	100%	
58	Jumlah pemenuhan bahan bacaan					3 media	3 media	6 media			3 media	3 media	6 media			100%	100%	100%	
59	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					3 kali	3 kali	6 kali			3 kali	3 kali	6 kali			100%	100%	100%	
60	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah					100 kali	100%	100 %			100 kali	100%	200 %			100%	100%	100%	
61	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi					3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			100%	100%	100%	
62	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					5 jenis	5 jenis	10 jenis			5 jenis	5 jenis	10 jenis			100%	100%	100%	
63	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik					100 %	100%	200 %			100 %	100%	200 %			100%	100%	100%	
64	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1 unit	1 unit	2 unit			1 unit	1 unit	2 unit			100%	100%	100%	
65	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya					1 unit	1 unit	2 unit			1 unit	1 unit	2 unit			100%	100%	100%	
66	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara					17 unit	17 unit	34 unit			17 unit	17 unit	34 unit			100%	100%	100%	
67	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya					17 unit	17 unit	34 unit			17 unit	17 unit	34 unit			100%	100%	100%	
68	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara					2 lokasi	2 lokasi	4 lokasi			2 lokasi	2 lokasi	4 lokasi			100%	100%	100%	
69	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara					3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi			100%	100%	100%	
Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik																			
70	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)					81,6 (sedang)	81,6	123 I-PIKP			62 (sedang)	123 I-PIKP	123 I-PIKP			100%	100%	100%	
71	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika					85,81 baik	85,81	168 IKM			84,5 (baik)	168 IKM	168 IKM			100%	100%	100%	
72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik					100 %	100	200 %			100 %	200 %	200 %			100%	100%	100%	
73	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi					5 media	5	10 media			5 media	10 media	10 media			100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
74	Jumlah program siaran radio per minggu					7 program	7	14 program			7 program	7	14 program			100%	100%	100%	
75	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID					100 %	100%	100 %			100 %	100%	100 %			100%	100%	100%	
76	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti					100 %	100%	100 %			100 %	100%	100 %			100%	100%	100%	
77	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan					5 desa	5 desa	10 desa			5 desa	5 desa	10 desa			100%	100%	100%	
78	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah					45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama	90 mitra kerjasama			45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama	90 mitra kerjasama			100%	100%	100 %	
79	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial					12.000 pengikut	12.000 pengikut	25.000 pengikut			12.000 pengikut	12.000 pengikut	25.000 pengikut			100%	100%	100%	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																			
80	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi					2 Level	level 2	Level 4 indikator terkelola			2 Level	level 2	Level 4 indikator terkelola			100%	100%	100%	
81	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)					18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	36 indikator terkelola			18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	36 indikator terkelola			100%	100%	100%	
82	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah					100 %	100%	100 %			100 %	100%	100 %			100%	100%	100%	
83	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain					67 %	67%	167 %			67 %	67%	167 %			100%	100%	100%	
84	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain					43 Subdomain	43 sub domain	107 subdomain			43 Subdomain	43 sub domain	107 subdomain			100%	100%	100%	
85	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah					68 titik	68	136 titik			68 titik	68	136 titik			100%	100%	100%	
86	Persentase Aplikasi yang terintegrasi					20 %	25	40 %			20 %	25	40 %			100%	100%	100%	
87	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun					2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen			2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen			100%	100%	100%	
88	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar					20 %	20%	45 %			20 %	20%	45 %			100%	100%	100%	
89	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan					4 aplikasi	5 aplikasi	9 aplikasi			4 aplikasi	5 aplikasi	9 aplikasi			100%	100%	100%	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																			
90	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan					100 %	100%	100 %			100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	
91	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika					3,164 IPP	3,164	7 (baik) IPP			3,52 IPP	7 (baik) IPP	7 (baik) IPP			100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
92	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang					3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen				3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen		100%	100%	100%	
93	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang					9 kali	9 kali	18 kali				9 kali	9 kali	18 kali		100%	100%	100%	
94	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola					28 data sektoral	28 data sektoral	56 data sektoral				28 data sektoral	28 data sektoral	56 data sektoral		100%	100%	100%	
95	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik					50 %	50%	75 %				50 %	50%	75 %		100%	100%	100%	
96	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi					50 %	50%	75 %				50 %	50%	75 %		100%	100%	100%	
97	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi					2 sistem elektronik	3 sistem elektronik	5 sistem elektronik				2 sistem elektronik	3 sistem elektronik	5 sistem elektronik		100%	100%	100%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
98	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur								100%					100%					100%
99	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan								100%					100%					100%
100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								3 dok					3 dok					100%
101	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								5 Lap					5 Lap					100%
102	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu								100%					100%					100%
103	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								32 orang/bulan					32 orang/bulan					100%
104	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								2 dokumen					2 dokumen					100%
105	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								1 Laporan					1 Laporan					100%
106	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran								100%					100%					100%
107	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								12 paket					12 paket					100%
108	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								12 paket					12 paket					100%
109	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								6 paket					6 paket					100%
110	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								5 paket					5 paket					100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
111	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								3 dokumen					3 dokumen					100%
112	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								5 Laporan					5 Laporan					100%
113	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah								100%					100%					100%
114	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								12 Laporan					12 Laporan					100%
115	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan								12 Laporan					12 Laporan					100%
116	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik								100%					100%					100%
117	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								1 unit					1 unit					100%
118	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								17 unit					17 unit					100%
119	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								2 unit					2 unit					100%
120	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								63 unit					63 unit					100%
Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik																			
121	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi								10%					10%					100%
122	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik								3.5 %					3.5 %					100%
123	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								3 dokumen					3 dokumen					100%
124	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik								3 dokumen					3 dokumen					100%
125	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik								2 dokumen					2 dokumen					100%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																			
126	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik								100%					100%					100%
127	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet								53 Perangkat Daerah					53 Perangkat Daerah					100%
128	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								1 dokumen					1 dokumen					100%
129	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								1 sistem					1 sistem					100%
130	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi								2 aplikasi					2 aplikasi					100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
131	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								1 dokumen					1 dokumen					100%
132	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola								1 unit					1 unit					100%
133	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis yang dikembangkan								2 unit					2 unit					100%
134	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah								2 Layanan					2 Layanan					100%
135	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City								1 dokumen					1 dokumen					100%
136	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								1 Dokumen					1 Dokumen					100%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																			
137	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan								100%					100%					100%
138	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data								28 Data Sektoral					28 Data Sektoral					100%
139	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								2 dokumen					2 dokumen					100%
140	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun								1 dokumen					1 dokumen					100%
141	Jumlah Infrastruktur Statistik								1 unit					1 unit					100%
142	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun								1 dokumen					1 dokumen					100%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi																			
143	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik								50 Persen					50 Persen		N/A	N/A	N/A	100%
144	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo								53 Perangkat daerah					53 Perangkat daerah		N/A	N/A	N/A	100%
145	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan								1 dokumen					1 dokumen		N/A	N/A	N/A	100%
146	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								1 Laporan					1 Laporan		N/A	N/A	N/A	100%
147	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi								53 Perangkat daerah					53 Perangkat daerah		N/A	N/A	N/A	100%

Keterangan Tabel :

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perubahan regulasi yaitu :

1. Perubahan nomenklatur program sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2020 mengalami perubahan program dan kegiatan, sedangkan tahun 2021, nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan mengalami perubahan yang disesuaikan indikator dan target pusat;
2. Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri nomor 050- 5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada rencana kerja tahun 2023 terdapat perubahan indikator sub kegiatan yang ditetapkan oleh kemendagri sesuai dengan Kepmendagri 050- 5889 tahun 2021.
3. Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Keputusan ini mengatur tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada rencana kerja tahun 2024 terdapat lagi perubahan indikator sub kegiatan sesuai Permendagri
4. Total program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2020-2024 sebanyak 5 program. Namun tidak seluruh program dan kegiatan dilaksanakan hingga 5 tahun. Hal ini disebabkan adanya perubahan Nomenklatur berdasarkan regulasi di atas. Indikator kinerja pada tahun 2020 seluruhnya mencapai target. Pada tahun 2021-2023 seluruh Indikator Kinerja mencapai target. Sedangkan pada tahun 2024 pada IKU belum mencapai target yaitu dengan realisasi 98,9, sedangkan seluruh target Sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai

INTERPRETASI KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Kesenjangan (Gap) Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan periode sebelumnya, terdapat kesenjangan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam beberapa aspek, antara lain:

- **Pengelolaan Infrastruktur TIK :**

Infrastruktur Jaringan (Jaringan Internet dan Intranet) Kondisi Aktual:

1. Cakupan jaringan internet Pemkab Jombang pada seluruh perangkat daerah telah terkoneksi namun terdapat beberapa perangkat daerah mengalami koneksi lambat atau tidak stabil pada beberapa titik;
2. Wifi Publik Desa telah terkoneksi, namun beberapa titik masih tidak stabil.

Faktor Penyebab Kesenjangan:

1. Keterbatasan anggaran untuk perluasan jaringan fiber optic;
2. Topografi/geografi wilayah yang menyulitkan pemasangan infrastruktur.

- **Aplikasi Layanan Pemerintah Daerah**

Kondisi Aktual:

Tidak semua aplikasi terintegrasi, menyebabkan duplikasi data dan proses kerja yang tidak efisien.

Faktor Penyebab Kesenjangan:

1. Tidak ada sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi;
2. Pengembangan aplikasi belum sesuai arsitektur SPBE.

- **Pusat Data Center**

Kondisi Aktual:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki pusat data, namun masih dalam kapasitas terbatas (kapasitas penyimpanan, redundansi, dan backup belum optimal);
2. Belum semua OPD memigrasikan data atau sistem ke pusat data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;

3. Sistem keamanan siber masih minim; belum ada monitoring ancaman secara real-time.

Faktor Penyebab Kesenjangan:

1. Keterbatasan infrastruktur server dan sistem backup.
2. Minimnya kebijakan wajib migrasi data terpusat.
3. Kurangnya kapasitas teknis SDM untuk manajemen server dan keamanan data.

- **Layanan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi**

Kesenjangan Jangkauan Informasi

Kondisi Aktual :

1. Informasi pemerintah daerah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil.
2. Diseminasi lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Akses informasi di desa-desa masih rendah.

Faktor Penyebab Kesenjangan :

1. Minimnya sarana komunikasi di daerah terpencil;
2. Ketergantungan pada media digital yang belum merata jangkauannya;
3. Belum optimalnya sinergi dengan radio komunitas/lokal sebagai sarana penyebaran informasi.

- **Kesenjangan Kualitas dan Relevansi Konten**

Kondisi Aktual:

Banyak konten masih bersifat formal, teknokratis, dan tidak menyesuaikan dengan preferensi publik.

Faktor Penyebab:

1. Kurangnya tenaga kreatif (content creator) yang memahami komunikasi publik secara efektif.
2. Keterbatasan pelatihan dalam manajemen komunikasi yang adaptif.
3. Penyusunan konten belum berbasis analisis kebutuhan informasi masyarakat

- **Kesenjangan Pemanfaatan Media dan Kanal Informasi**

Kondisi Aktual:

1. Pemanfaatan seluruh kanal diseminasi (media sosial, website, radio, media luar ruang, dan media massa) secara seimbang dan terkoordinasi;
2. Dominasi media sosial, sementara media alternatif (radio lokal, baliho, videotron) kurang dimanfaatkan secara optimal.

Faktor Penyebab:

1. Fokus utama masih pada pengelolaan akun media sosial saja.
2. Koordinasi dengan media lokal dan komunitas informasi belum maksimal.
3. Belum ada roadmap komunikasi publik yang menyeluruh.

- **Layanan Satu Data Jombang**

Kesenjangan Koordinasi Antar-Perangkat Daerah (Produsen Data)

Kondisi Aktual :

Semua OPD menyampaikan data sektoral secara berkala dan sesuai standar metadata, namun beberapa perangkat daerah belum konsisten menyampaikan data tepat waktu dan sesuai format.

Faktor Penyebab:

1. Kurangnya pemahaman OPD tentang peran mereka sebagai produsen data;
2. Belum adanya sanksi atau reward dalam pengelolaan data sektoral;
3. Tidak semua OPD memiliki petugas data yang kompeten.

- **Kesenjangan Kualitas dan Validitas Data**

Kondisi Aktual :

1. Data yang terpublikasi sudah tervalidasi dan memiliki metadata standar;
2. Masih ditemukan data yang tidak konsisten, tidak sinkron antar-OPD, dan tidak memiliki metadata.

Faktor Penyebab:

1. Tidak ada mekanisme validasi lintas OPD yang kuat;
2. Masih bergantung pada data manual atau Excel, bukan sistem berbasis database;
3. Minimnya pelatihan teknis pengelolaan statistik sektoral.

Kesenjangan ini merupakan permasalahan yang harus ditangani pada periode yang akan datang. Namun Kesenjangan GAP juga dapat diatasi dengan potensi-potensi keberhasilan kinerja sebagai berikut :

- **Layanan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah**

PD telah memiliki halaman resmi dan aktif diperbarui. Faktor Keberhasilan:

1. Adanya pelatihan pengelolaan konten bagi admin OPD.
2. Sistem kontrol dan evaluasi berkala dari Diskominfo.

- **Pengelolaan Media Sosial Resmi Pemerintah**

Capaian: Engagement rate meningkat dan informasi lebih cepat tersampaikan.

Faktor Keberhasilan:

1. Strategi komunikasi digital yang adaptif.
2. Respons cepat terhadap isu publik dan dinamika media sosial.

- **Penerapan Sistem Aplikasi Layanan Internal Pemerintah (e-Office, e-Surat, dll)**

Faktor Keberhasilan:

1. Dukungan anggaran dan komitmen pimpinan daerah.
2. Bimbingan teknis intensif kepada ASN pengguna aplikasi.

- **Potensi dan Permasalahan Pelayanan**

Potensi:

1. Dukungan teknologi informasi yang terus berkembang.
2. Antusiasme masyarakat terhadap media digital dan pelayanan berbasis online.
3. Komitmen pimpinan daerah terhadap digitalisasi pelayanan publik.

Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM yang memahami teknologi secara mendalam.
2. Masih ada perangkat desa/OPD yang belum memiliki infrastruktur TIK memadai.
3. Literasi digital masyarakat yang belum merata

Interpretasi kinerja pelayanan Diskominfo menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pencapaian pada beberapa aspek pelayanan digital dan pengelolaan media, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal pemerataan infrastruktur dan keterbukaan informasi. Diperlukan upaya

strategis, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

TABEL TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	872.236.035					783.583.643					89,84							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.100.735.100					1.053.416.000					95,70							
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	15.450.000					15.335.000					99,26							
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	345.944.500					316.123.000					91,38							
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	764.980.800					706.333.300					92,33							
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.797.770.450					2.513.979.587					89,86							
Program Pengembangan Layanan e-Government	899.326.400					879.556.106					97,80							
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	37.280.000					36.930.000					99,06							
Program Penyelenggaraan Persandian	100.934.000					99.078.500					98,16							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.643.398.752	7.821.236.581	7.276.209.962	10.842.097.183		8.580.168.713	7.458.797.006	6.444.815.163	10.364.843.085		88,97	95,37	88,57	95,60	7.116.588.496	6.569.724.793	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		3.234.791.200	3.869.703.500	3.003.861.050	3.719.152.891		3.137.942.453	3.786.986.231	2.958.124.250	3.683.208.621		97,01	97,86	98,48	99,03	2.765.501.728	2.713.252.311	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		3.661.105.000	3.496.508.850	3.893.911.000	5.387.174.223		3.460.006.407	3.007.598.844	3.693.257.289	5.188.533.666		94,51	86,02	94,85	96,31	3.287.739.815	3.069.879.241	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		245.796.000	340.727.500	442.623.750	493.534.500		238.797.582,00	339.036.712	439.246.531	489.147.909		97,15	99,50	99,24	99,11	304.536.350	301.245.747	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		93.830.750	203.107.400	235.438.800	230.943.700		82.363.910,00	200.813.753	233.331.840	228.202.436		87,78	98,87	99,11	98,81	152.664.130	148.942.388	
TOTAL	6.934.657.285	16.878.921.702	15.731.283.831	14.852.044.562	20.672.902.497	6.404.335.136	15.499.279.065	14.793.232.546	13.768.775.073	19.953.935.717	94,82		91,83	94,04	92,71	96,52	13.627.030.518,40	12.803.044.480

Dari tabel TC.24 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dapat dikatakan baik pada tahun 2025 yaitu 96,52% dan kurang baik pada tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan meliputi :

1. Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan

- a. Tersedianya SOP pengelolaan keuangan yang jelas dan mengikuti regulasi;
- b. Adanya sistem e-monev yang mempermudah pelacakan dan penyesuaian anggaran.

Permasalahan:

- a. Prosedur birokratis yang terlalu panjang (verifikasi, persetujuan, pencairan) menghambat pelaksanaan program tepat waktu;
- b. Kurangnya pemahaman teknis oleh pelaksana kegiatan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa.

2. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Tersedianya personil perencana dan pelaksana kegiatan yang memahami teknis penyusunan anggaran dan pelaporan;
- b. Adanya tim keuangan (bendahara, PPK, PPTK) yang telah tersertifikasi.

Permasalahan:

- a. Kekurangan SDM di bidang perencanaan dan keuangan, terutama di bidang teknis TIK atau statistik, membuat beban kerja menumpuk pada orang tertentu;
- b. Kualitas SDM belum merata; beberapa ASN belum memiliki kompetensi dalam menyusun TOR/RAB, dokumen pengadaan, dan laporan keuangan kegiatan.

3. Progres Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Perencanaan program disusun secara realistis, berbasis data dan kebutuhan aktual OPD serta masyarakat;
- b. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi keterlambatan/kendala pelaksanaan sejak awal.

Permasalahan :

- a. Kegiatan baru berjalan di triwulan III atau IV, menyebabkan serapan

anggaran rendah dan kualitas pelaksanaan terburu-buru.

- b. Adanya perubahan kebijakan refocusing anggaran, atau revisi RKPD) yang berdampak pada tertundanya kegiatan prioritas.

4. Ketepatan Alokasi Anggaran terhadap Prioritas Pelayanan

- a. Alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan layanan strategis seperti penguatan jaringan, pengelolaan data, dan diseminasi informasi;
- b. Adanya koordinasi antara Bappeda dan Diskominfo dalam menetapkan program prioritas TIK dan informasi public;

Permasalahan :

- a. Belum semua layanan penting mendapatkan alokasi memadai, misalnya untuk pengembangan pusat data, keamanan siber, atau literasi digital masyarakat.
- b. Belanja operasional dan rutinitas (misalnya rapat, perjalanan dinas) masih mendominasi dibandingkan belanja pelayanan publik langsung.

5. Ketersediaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Pemanfaatan sistem keuangan daerah (e-monev dan SIPD) mempercepat proses penganggaran dan pelaporan.
- b. Integrasi sistem monitoring kegiatan (e-Monev) mendukung akuntabilitas pelaksanaan program.

Permasalahan

Beberapa sistem belum terintegrasi satu sama lain sehingga menyebabkan duplikasi input data dan memperlambat pencairan anggaran.

6. Faktor Eksternal dan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

- a. Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah terhadap transformasi digital mendorong percepatan layanan TIK;
- b. Sinergi yang baik dengan OPD lain sebagai produsen data atau pengguna aplikasi Diskominfo.

Permasalahan

Kurangnya komitmen OPD lain untuk mendukung pengelolaan data sektoral atau berbagi data, membuat beberapa program terhambat. Dapat dikatakan Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Dinas Kominfo

dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, antara lain:
Efektivitas prosedur dan sistem keuangan,

- Ketersediaan SDM yang kompeten dan cukup,
- Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program,
- Kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pelayanan,
- Dukungan teknologi dan kebijakan lintas sektor.

Rekomendasi perbaikan meliputi:

- Peningkatan kapasitas SDM bidang perencanaan dan keuangan,
- Optimalisasi integrasi sistem informasi keuangan dan monitoring,
- Meningkatkan sinergi antar-OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan berbasis digital.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai Perangkat Daerah memiliki kelompok sasaran seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung layanan publik/Pemerintah pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Jombang. Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mendukung program prioritas Bupati yaitu Membangun Desa dan Kota Untuk Semua dengan Program Prioritas Digitalisasi desa

dan pemerintahan desa Sub Program Prioritas : Program Wifi gratis tingkat Desa dan Kelurahan

Dinas Kominfo terdapat keterlibatan kinerja lintas sektoral dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DPMPD sebagai leading sektoral mengawal implementasi program strategis di tingkat desa, sehingga Dinas Kominfo dapat melaksanakan menyediakan koneksi free wifi pada 306 desa. Kelompok sasaran selanjutnya yaitu untuk mendukung Program Prioritas Bupati Program Prioritas Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih Sub Program Prioritas : Pengembangan dan aplikasi Jombang Satu Data terdapat kinerja lintas sektoral antara Dinas Kominfo dan BAPPERIDA. BAPPERIDA dalam hal ini sebagai wali data yang tertuang dalam SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/211/415.10.1.3/2023 Tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang. Dalam pengembangan satu data BAPPERIDA berperan sebagai pembina data dan Kominfo sebagai penyedia sarana prasarana juga walidata.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi pelayanan yang diharapkan/direncanakan. Permasalahan harus ditangani dalam dokumen Rentra yang menggambarkan prioritas perangkat daerah. Secara detail berikut uraian mengenai permasalahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel TB.35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berita Media masih ada yang tendensius	Keberadaan media di daerah yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu masih menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan memihak	(1) Minimnya Komunikasi Dua Arah antara Pemerintah dan Media; (2) Tidak Adanya Pedoman atau Kode Etik Bersama Pemerintah dan Media Lokal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan	Adanya kesenjangan digital antar generasi di OPD yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi.	(1) Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik; (2) Keterbatasan SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Media Sosial; (3) Tidak Tersedianya Pedoman dan SOP Pengelolaan Media Sosial OPD; (4) Kurangnya Pelatihan atau Kapasitas Digital di Kalangan ASN
	Perkembangan Teknologi Informasi yang tidak bisa dikendalikan	Kesenjangan Akses dan Infrastruktur TIK	(1) Belum Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Pengendalian TI di Daerah; (2) Rendahnya Literasi Digital Masyarakat dan ASN; (3) Kurangnya Infrastruktur dan Sistem Pengawasan Teknologi di Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum berfungsinya PPID Pembantu di masing- masing OPD secara optimal	Tersedianya akses informasi yang mudah, adil serta keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah	(1) Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Pimpinan OPD terhadap Keterbukaan Informasi Publik; (2) Belum Tersedianya SDM Khusus PPID Pembantu di Perangkat Daerah; (3) Minimnya Pelatihan dan Pembinaan Teknis oleh PPID Utama dan PPID Pembantu
	belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik	Kurangnya Pemerintah Daerah dan penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk dapat segera terhubung dengan LAPOR agar penanganan pengaduan dapat terintegrasi secara optimal.	(1) Rendahnya Komitmen Pimpinan OPD terhadap Responsifitas Layanan Publik; (2) Kurangnya Sosialisasi Kanal Pengaduan kepada Masyarakat
	Konektivitas jaringan intra belum menjangkau seluruh perangkat daerah dan seluruh wilayah desa/kelurahan	Infrastruktur yang Tidak Memadai (Beberapa organisasi mungkin menghadapi kendala dalam meng-upgrade atau mengganti infrastruktur mereka untuk mendukung transformasi digital. Ini dapat mencakup masalah terkait dengan biaya, kompleksitas, atau kesulitan teknis)	(1) Terbatasnya Infrastruktur TIK di Daerah; (2) Kurangnya Koordinasi Antara OPD dan Penyedia Infrastruktur TIK; (2) Topografi dan Letak Geografis Wilayah yang Menjadi Tantangan Teknis khususnya pada desa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Data center (pusat data) sebagai penempatan data dan aplikasi pemerintah daerah belum memiliki standar (SNI) sebagaimana diamanatkan Pemerintah	Integrasi data yang memerlukan komitmen bersama (Ekosistem transformasi digital salah satunya merujuk pada penggunaan data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan)	(1) Kurangnya SDM TIK yang Paham Standar Teknis dan Sertifikasi Data Center; (2) Masih Lemahnya Regulasi Teknis di Daerah Terkait Pengelolaan Data Pemerintah
	Pengembangan aplikasi SPBE di perangkat daerah yang belum sesuai peta rencana	Integrasi Sistem yang Rumit (Organisasi yang telah menggunakan sistem legacy yang sudah ada mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan solusi digital baru dengan sistem yang sudah ada. Keterbatasan interoperabilitas dapat menjadi hambatan)	(1) Tidak Ada Koordinasi Terpusat atas Pengembangan Aplikasi Antar-OPD; (2) Belum Semua OPD Memahami dan Mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah; (3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kesesuaian Aplikasi dengan Peta SPBE
	Layanan kedaruratan 112 belum terintegrasi dan terpadu dengan layanan di perangkat daerah dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten	Banyak warga belum mengetahui fungsi 112 atau menganggap itu hanya untuk kebakaran	(1) Belum Terbangunnya Sistem Integrasi Antar-Instansi Terkait; (2) Kurangnya SDM dan Tim Tanggap Darurat Khusus untuk Menangani Layanan 112; (3) Minimnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			terhadap Layanan 112
	belum adanya kebijakan, proses dan teknologi dalam pengamanan informasi	Ancaman keamanan informasi (Ancaman keamanan informasi di era digital merujuk pada potensi risiko dan bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan data dan sistem komputer dalam lingkungan digital)	(1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Tentang Pentingnya Keamanan Informasi; (2) Minimnya SDM dan Kapasitas Keamanan Siber di OPD; (3) Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Keamanan Informasi
	Minimnya Pemanfaatan Data dalam Perumusan Kebijakan	Tantangan Pengelolaan Data (Volume besar data yang dihasilkan dalam lingkungan digital dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data secara efektif.)	(1) Kualitas dan Ketersediaan Data yang Kurang Memadai; (2) Kurangnya Kapasitas SDM dalam Analisis dan Interpretasi Data

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	belum adanya integrasi sistem aplikasi yang menghasilkan data	Data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi daerah sering kali tidak terintegrasi, menyebabkan inkonsistensi dan redundansi dalam pengelolaan informasi.	(1) Pengembangan Aplikasi Dilakukan Secara Parsial dan Terpisah; (2) Tidak Tersedianya Standar Teknis dan Protokol Integrasi; (3) Minimnya SDM dengan Kompetensi Integrasi Sistem dan Manajemen Data

2.2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD bersumber dari Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu jabatan 5 tahun ke depan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Visi tersebut menggambarkan harapan bahwa Kabupaten Jombang pada masa yang akan datang (tahun 2029) telah mengalami kemajuan di berbagai bidang yang mengindikasikan kesejahteraan untuk semua atau untuk seluruh masyarakat Jombang tanpa terkecuali. Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi berikut:

1. Maju

Maju mengandung makna kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu terlibat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan.

2. Sejahtera

Sejahtera bermakna kondisi Kabupaten Jombang di tahun 2029 yang terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan.

Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 harus mendukung tercapainya visi **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-

2029 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global.** Misi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial lainnya, termasuk di dalamnya penurunan kemiskinan dan perlindungan masyarakat dari bencana.
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.** Misi ini diselenggarakan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya unggulan berbasis teknologi, meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan, penciptaan ekonomi kreatif, green economy, bisnis rintisan start up dan marketplace. Bentuk nyata penyelenggaraannya berupa peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian Kabupaten Jombang (khususnya sektor unggulan) dan investasi daerah, peningkatan pendapatan kelompok masyarakat (khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sehingga mampu memperkecil kesenjangan pendapatan, serta penciptaan stabilitas harga yang mampu mempertahankan dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat.
3. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.** Misi ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas dan berwawasan lingkungan, baik infrastruktur kawasan permukiman, pekerjaan umum maupun perhubungan. Arah pengembangan infrastruktur difokuskan pada; (1) pemenuhan infrastruktur wajib dasar; (2) kawasan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru; (3) pengembangan infrastruktur jalan yang berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Misi ini juga berfokus pada upaya-upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga diharapkan mampu memitigasi atau menyelesaikan

permasalahan-permasalahan rendahnya/menurunnya kualitas lingkungan hidup.

4. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.

Misi ini diselenggarakan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan menghargai perbedaan (harmoni sosial). Pembangunan ketahanan sosial, khususnya pada penciptaan masyarakat yang agamis, tertib, tentram dan terlindungi serta rukun menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Pembangunan budaya dan kesetaraan gender juga merupakan fokus lainnya dari misi ini.

5. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.

Transformasi tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik. Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalamnya. Selain itu, menciptakan kebijakan publik dan membangun perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta aparatur sipil negara yang profesional, juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 tersebut diharapkan menjawab semua isu strategis pembangunan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Kesesuaian antara misi pembangunan dalam menjawab isu-isu strategis

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD
Percepatan penguatan kualitas sumber daya	Mewujudkan Sumber Daya Manusia
manusia (SDM) yang religious, unggul dan berdaya saing yang bertumpu pada keluarga berkualitas;	berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global.
Penguatan pondasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan perluasan investasi yang berdampak pada penurunan pengangguran,	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD
kemiskinan dan kesenjangan yang bertumpu pada optimalisasi sektor utama (perdagangan dan industri) didukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan Usaha Mikro;	
Optimalisasi sektor pertanian melalui implementasi agro-minapolitan, hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah (Value Added) bagi petani dan mendukung ketahanan pangan daerah.	
Percepatan penyediaan infrastruktur dasar inklusif pendorong konektivitas pengembangan wilayah dan penyediaan utilitas sarana prasarana perkotaan yang cerdas (Smart City) bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali;	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup penerapan kebijakan ekonomi hijau (Net Zero Emission), konservasi keanekaragaman hayati sesuai kewenangan daerah dan penguatan resiliensi masyarakat terhadap bencana;	
Peningkatan kesejahteraan sosial melalui intervensi yang tepat terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang difokuskan pada penduduk miskin melalui pendekatan terintegrasi dengan melibatkan multi stakeholder;	Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.
Mewujudkan kesetaraan kerukunan dalam dan masyarakat berbasis nilai-nilai budaya serta agama guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.	
Penguatan tata kelola pemerintah yang adaptif, kapasitas aparatur yang lincah (Agile) dan inovasi	Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD
elayanan publik yang berbasis information, communication and technology (ICT)	

Program Prioritas (Quick Wins) Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Program Nomenklatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Berikut :

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	SUB PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR
	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Pengembangan dan aplikasi Jombang Satu Data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
		Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e services), pengawasan/ command center (e- monitoring), perencanaan pembangunan (e- planning), penganggaran (e- budgeting/real time budgeting), pengadaan barang dan jasa (e procurement) dan sebagainya.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Membangun Desa dan Kota Untuk Semua	Program Wifi gratis tingkat Desa dan Kelurahan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Pengembangan dan aplikasi Jombang Satu Data
- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (eservices), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/realtime budgeting), pengadaan barang dan jasa (eprocurement) dan sebagainya;

- Program Wifi gratis tingkat Desa dan Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang meliputi :

Faktor Penghambat

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga dibutuhkan penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan infrastruktur;
2. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum memadai;
3. Data statistik sektoral yang belum optimal;
4. Keamanan informasi dalam pertukaran data elektronik pemerintahan yang belum optimal;
5. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang belum optimal;
6. Tantangan Keamanan Siber: keamanan siber yang semakin kompleks dapat menjadi risiko serius terutama dengan adopsi teknologi yang lebih tinggi.

Faktor Pendorong

1. Transformasi Digital Nasional
Pemerintah pusat sedang mendorong transformasi digital di semua sektor (melalui SPBE, Satu Data Indonesia, Smart City, dll);
2. Perkembangan Teknologi TIK
Adanya inovasi seperti cloud computing, AI, big data dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, dengan Teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk sistem informasi, keamanan siber, dan integrasi data antar perangkat daerah;
3. Kebutuhan Masyarakat Akan Layanan Digital

Masyarakat semakin terbiasa dan membutuhkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital sehingga peluang bagi Diskominfo untuk mengembangkan aplikasi pelayanan, portal informasi, dan kanal komunikasi publik;

4. Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia sebagai pendorong dalam mengelola integrasi data antar OPD dan dapat memperkuat peran Diskominfo sebagai pengelola data;

5. Peningkatan Literasi Digital

Peningkatan Literasi Digital untuk meningkatkan literasi digital dikalangan masyarakat melalui program-program edukasi dan pelatihan;

6. Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik

2.2.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan Rencana Tata Ruang Kabupaten Jombang.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Dokumen

KLHS RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan prioritas berdasarkan hasil integrasi dari isu strategis menurut Stakeholder dan kebijakan terkait, isu lingkungan hidup dan isu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) prioritas.

Analisis yang digunakan adalah content analysis untuk mendapatkan isu pembangunan yang paling strategis. Rumusan isu strategis menurut dokumen tersebut adalah:

(i) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Isu ini dirumuskan dari masukan stakeholders serta kebijakan bahwa terjadi kecepatan pergeseran perubahan budaya masyarakat pertanian menjadi masyarakat perkotaan. Isu lain yang diintegrasikan ke isu strategis ini adalah isu dari capaian TPB

Kabupaten Jombang, yaitu:

- (i) penurunan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- (ii) eliminasi jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana; dan
- (iii) peningkatan tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan

Dalam KLHS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berkaitan dengan peningkatan tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan, faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan yang mempengaruhi permasalahan layanan dari KLHS yaitu :

Faktor Penghambat

1. Infrastruktur

- **Pedesaan:**

- Rendahnya pembangunan infrastruktur TIK
- Biaya instalasi tinggi, terutama di wilayah geografis sulit dijangkau di daerah pedesaan.

- **Perkotaan:**

- Keterbatasan ruang, gangguan utilitas lain (pipa, kabel listrik).

2. Literasi Digital Masyarakat

- **Pedesaan:**

- Masyarakat belum memahami manfaat akses internet tetap.
- Masih mengandalkan jaringan seluler (mobile broadband).

- **Perkotaan:**

- Sebagian masyarakat hanya menggunakan internet untuk hiburan, belum untuk produktivitas atau usaha.

Faktor Pendorong

1. Kebijakan Nasional Mendukung Digitalisasi

Program **Satu Data Indonesia**, dan **Smart City**.

2. Tuntutan Masyarakat akan Akses Internet Cepat

Pertumbuhan penggunaan video conference, e-learning, e-commerce mendorong kebutuhan akan akses tetap yang stabil.

3. Potensi Ekonomi Digital

- a. Akses internet tetap dapat mendukung:
- b. UMKM digital di desa (e-commerce lokal)
- c. Digitalisasi pertanian, kesehatan, dan Pendidikan
- d. Transformasi layanan publik desa/kelurahan

4. SOP Mekanisme Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Jombang yang berkualitas dan akuntabel

2.2.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam **Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025-2029 antara lain :

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Transformasi Digital	Berita Media masih ada yang tendensius	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Isu ini dirumuskan dari masukan stakeholders serta kebijakan bahwa terjadi kecepatan pergeseran perubahan budaya masyarakat pertanian menjadi masyarakat perkotaan Isu lain yang diintegrasikan ke isu strategis ini adalah isu dari capaian TPB	Peran media sosial yang menciptakan terjadinya tsunami informasi sehingga masyarakat cukup kesulitan untuk memilah mana informasi yang tepat dan benar	Masih adanya media yang memberitakan informasi yang kurang tepat sehingga beresiko menimbulkan hoax, misinformasi, dan disinformasi	Keberadaan media di daerah yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu masih menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan memihak	Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan yang berimbang
		Kabupaten Jombang, yaitu: peningkatan tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan				

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan		Keselarasn Budaya Organisasi (Transformasi digital tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga perubahan budaya. Keselarasn budaya organisasi yang tidak memadai dapat menjadi hambatan karena resistensi terhadap perubahan)	Transformasi digital yang cukup massif ini masih belum direspon secara optimal oleh OPD di daerah	Adanya kesenjangan digital antar generasi di OPD yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi.	Peningkatan kapasitas SDM kehumasan di OPD agar untuk lebih optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital.
	Perkembangan Teknologi Informasi yang tidak bisa dikendalikan		Kurangnya Literasi dan Keterampilan Digital. (Tidak semua anggota organisasi atau masyarakat memiliki literasi digital dan keterampilan teknologi yang cukup. Sehingga kurangnya pemahaman tentang teknologi digital ini dapat menghambat penerimaan solusi digital dan penggunaannya)	Tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya mampu merespon perkembangan teknologi informasi dan digital dengan baik.	Kesenjangan Akses dan Infrastruktur TIK	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum berfungsinya PPID Pembantu di masing-masing OPD secara optimal		Kurangnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi menjadi penyebab tidak terlaksananya implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Keterbukaan informasi menjadi peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	Tersedianya akses informasi yang mudah, adil serta keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah	Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD
	belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik		Mewujudkan pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respon dan solusi cepat serta terpercaya menambah capaian indikator dan prosentase jumlah pengaduan	SP4N-LAPOR! menjadikan satu saluran pengaduan secara nasional untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan dengan menerapkan kebijakan "No Wrong Door Policy" sebagai alat ukur atas tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah	Kurangnya Pemerintah Daerah dan penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk dapat segera terhubung dengan LAPOR agar penanganan pengaduan dapat terintegrasi secara optimal.	Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Konektivitas jaringan intra belum menjangkau seluruh perangkat daerah dan seluruh wilayah desa/kelurahan		Belum meratanya infrastruktur digital (internet, jaringan fiber, BTS) terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).	Penyediaan internet cepat dan berkualitas didesa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Infrastruktur yang Tidak Memadai (Beberapa organisasi mungkin menghadapi kendala dalam meng-upgrade atau mengganti infrastruktur mereka untuk mendukung transformasi digital. Ini dapat mencakup masalah terkait dengan biaya, kompleksitas, atau kesulitan teknis)	Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi
	Data center (pusat data) sebagai penempatan data dan aplikasi pemerintah daerah belum memiliki standar (SNI) sebagaimana diamanatkan Pemerintah		Banyak data center milik Dinas Kominfo belum memenuhi standar nasional/internasional seperti Tier III, ISO 27001, atau belum memiliki sertifikasi pusat data nasional (PDN).	Belum terintegrasinya pusat data nasional dan transformasi digital daerah	Integrasi data yang memerlukan komitmen bersama (Ekosistem transformasi digital salah satunya merujuk pada penggunaan data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan)	Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Pengembangan aplikasi SPBE di perangkat daerah yang belum sesuai peta rencana		Aplikasi SPBE tidak terhubung satu sama lain karena perbedaan platform, format data, dan standar integrasi.	Rendahnya integrasi dan adopsi sistem digital dalam birokrasi.	Integrasi Sistem yang Rumit (Organisasi yang telah menggunakan sistem legacy yang sudah ada mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan solusi digital baru dengan sistem yang sudah ada. Keterbatasan interoperabilitas dapat menjadi hambatan)	Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
	Layanan kedaruratan 112 belum terintegrasi dan terpadu dengan layanan di perangkat daerah dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten		Call Center 112 sering tidak terintegrasi secara real-time dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Damkar, BPBD, Polisi, atau RSUD	Layanan 112 kadang berjalan terpisah dari sistem digitalisasi daerah atau command center	Banyak warga belum mengetahui fungsi 112 atau menganggap itu hanya untuk kebakaran	Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
	belum adanya kebijakan, proses dan teknologi dalam pengamanan informasi		Kurangnya sinkronisasi antar kebijakan pusat dan daerah	Meningkatnya serangan siber, kebocoran data pribadi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan digital	Ancaman keamanan informasi (Ancaman keamanan informasi di era digital merujuk pada potensi risiko dan bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan data dan sistem komputer dalam lingkungan digital)	Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Minimnya Pemanfaatan Data dalam Perumusan Kebijakan		Perumusan kebijakan lebih dominan berdasarkan intuisi, kepentingan politik, atau kebiasaan, bukan data dan bukti	Perumusan kebijakan tidak melibatkan data dari sektor lain atau analisis berbasis kajian ilmiah	Tantangan Pengelolaan Data (Volume besar data yang dihasilkan dalam lingkungan digital dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data secara efektif.)	(1) Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Analisis Data (2) Kualitas Data yang Tidak Memadai
	belum adanya integrasi sistem aplikasi yang menghasilkan data		Tidak ada regulasi atau kebijakan formal yang mengatur proses integrasi, standar pengelolaan data, atau kewenangan pertukaran data antar OPD.	Data yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka, belum terdokumentasi, atau tersebar di berbagai instansi tanpa mekanisme akses yang jelas.	Data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi daerah sering kali tidak terintegrasi, menyebabkan inkonsistensi dan redundansi dalam pengelolaan informasi.	Belum terintegrasinya sistem aplikasi yang menghasilkan data. sehingga tidak bisa menyajikan data yang realtime

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga rumusannya menunjukkan kondisi yang akan dicapai.

Tujuan RPJMD Kabupaten Jombang pada Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Terciptanya SDM yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan sosial yang merata;
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital.

Untuk mendukung Tujuan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 maka Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan ke-5 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik.

3.2 SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan mendasarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Adapun Sasaran Dinas Kominfo Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah;
2. Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
3. Optimalnya data statistik sektoral;

4. Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi
5. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital.	Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik		Indeks SPBE/Pemerintah Digital	4.10	1.9	2.0	2.10	2.20	2.30	
		Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	9,4%	22,6%	35,8%	45,3%	86,8%	100 %	
		Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	
		Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	640	690	710	720	730	740	
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.10	85.90	85.95	86	86.05	86,10	

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

Target	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan koneksi internet dan intranet pada 61 OPD (120 titik koneksi) Menyediakan koneksi free wifi pada 306 desa/kelurahan 	Penyediaan peralatan jaringan pusat (NOC)	Penyediaan peralatan jaringan pada OPD	Pembangunan jaringan fiber optik perkotaan		
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan pusat data (ruang server) untuk memfasilitasi penempatan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik 	Pembangunan pusat komputasi (ruang server)	Penyediaan peralatan pusat komputasi (ruang server)			
Mengembangkan aplikasi dan basis data layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik terintegrasi (20%)	Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik terintegrasi (40%)	Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik terintegrasi (60%)	Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik terintegrasi (80%)	Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik terintegrasi (100%)
Memfasilitasi IP Publik, penyelenggaraan subdomain OPD, email OPD, dan subdomain desa	Pengembangan email resmi pemerintah daerah		Pengembangan situs web resmi pemerintah daerah		
Memfasilitasi koordinasi SPBE	ISO 27001			ISO 27001	
Memfasilitasi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112	Pengembangan Pusat Kendali	Pengembangan Pusat Kendali			
Memfasilitasi pemberian rekomendasi perizinan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP)	Fasilitasi PBIP	Fasilitasi PBIP	Fasilitasi PBIP	Fasilitasi PBIP	Fasilitasi PBIP

Target	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Penyusunan Masterplan Statistik dan Integrasi Data sektoral	Tersedianya dokumen Masterplan, sistem integrasi data awal				
Implementasi penguatan data sektoral berbasis digital	Terbangunnya dashboard sektoral				
Peningkatan kualitas dan frekuensi data statistik		OPD memiliki data standar & terintegrasi			
Penerapan dashboard untuk analisis kebijakan			70% aplikasi terintegrasi dengan dashboard		
Pengembangan sistem statistik berbasis blockchain				50% interoperabilitas data sektoral antar instansi terenkripsi blockchain (teknologi buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi secara transparan dan aman, membentuk rantai blok yang saling terhubung)	50% interoperabilitas data sektoral antar instansi terenkripsi blockchain (teknologi buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi secara transparan dan aman, membentuk rantai blok yang saling terhubung)
Pemetaan risiko dan audit keamanan sandi	Tersedianya dokumen audit,				
Penguatan CSIRT Jombangkab	Tersedianya Kebijakan Insiden				
Pengembangan SD sandi bersertifikasi		Minimal 70% staf bersertifikat keamanan siber			
Penilaian maturitas keamanan informasi (Indeks KAMI)			Penilaian Indeks KAMI yang telah di verifikasi BSSN		
Penerapan teknologi keamanan berbasis blockchain				50% sistem tidak ada insiden siber besar	

Target	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Partisipasi Publik dan Literasi Komunikasi	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui komunikasi yang transparan dan efektif melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pekan KIM • Warung Pojok Kebon Rojo • Podcast Kegiatan HUT Radio SJFM 	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui komunikasi yang transparan dan efektif melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pekan KIM • Warung Pojok Kebon Rojo • Podcast • Kegiatan HUT Radio SJFM • kegiatan sosialisasi "Bintang Kecil Siaran di radio" 	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui komunikasi yang transparan dan efektif melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pekan KIM • Warung Pojok Kebon Rojo • Podcast • Kegiatan HUT Radio SJFM kegiatan sosialisasi Pembentukan dan fasilitasi Komunitas "Jombang Talkers": Komunitas warga dan anak muda yang concern di bidang broadcasting dan public speaking	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui komunikasi yang transparan dan efektif melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pekan KIM • Warung Pojok Kebon Rojo • Sarpras Podcast • Kegiatan HUT Radio SJFM Lomba Siaran dan reportase dalam rangka HUT Radio Suara Jombang	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui komunikasi yang transparan dan efektif melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pekan KIM • Warung Pojok Kebon Rojo • Podcast • Kegiatan HUT Radio SJFM kegiatan sosialisasi Pembentukan dan fasilitasi Komunitas "Jombang Talkers": Komunitas warga dan anak muda yang concern di bidang broadcasting dan public speaking
Evaluasi dan Rebranding Komunikasi Pemerintah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda komunikasi publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ngopi Bareng Media • Intelligence Media Analyst Lomba Siaran dan reportase dalam rangka HUT Radio Suara Jombang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda komunikasi publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ngopi Bareng Media • Intelligence Media Analyst Lomba Siaran dan reportase dalam rangka HUT Radio Suara Jombang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda komunikasi publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ngopi Bareng Media • Intelligence Media Analyst Lomba Siaran dan reportase dalam rangka HUT Radio Suara Jombang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda komunikasi publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ngopi Bareng Media • Intelligence Media Analyst Lomba Siaran dan reportase dalam rangka HUT Radio Suara Jombang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda komunikasi publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ngopi Bareng Media • Intelligence Media Analyst Lomba Siaran dan reportase dalam rangka HUT Radio Suara Jombang
Peningkatan Kapasitas	Meningkatkan kapasitas SDM humas pemerintah melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Workshop Pejabat Penghubung 	Meningkatkan kapasitas SDM humas pemerintah melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Workshop Pejabat Penghubung 	Meningkatkan kapasitas SDM humas pemerintah melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Workshop Pejabat Penghubung 	Meningkatkan kapasitas SDM humas pemerintah melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Workshop Pejabat Penghubung 	Meningkatkan kapasitas SDM humas pemerintah melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Workshop Pejabat Penghubung

Target	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	g Laporan SP4N <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bimtek PPID • Workshop Konten Kreator • Workshop Medsos • Kominfo Goes To School 	ng Laporan SP4N <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bimtek PPID • Workshop Konten Kreator • Workshop Medsos • Kominfo Goes To School 	Laporan SP4N <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bimtek PPID • Workshop Konten Kreator • Workshop Medsos • Kominfo Goes To School 	Laporan SP4N <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bimtek PPID • Workshop Konten Kreator • Workshop Medsos • Kominfo Goes To School 	Laporan SP4N <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bimtek PPID • Workshop Konten Kreator • Workshop Medsos • Kominfo Goes To School

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan telah disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis. Penyesuaian dilaksanakan juga telah disesuaikan baik ranah daerah, regional, dan global. Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut :

TABEL 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi i: <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan b. pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah. • Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan melalui SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. tata kelola SPBE Pemerintah Daerah; b. Manajemen SPBE; c. Audit TIK; penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah; d. promosi literasi 	<p>Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal sebagai upaya menciptakan budaya kerja dan kualitas kerja yang lebih efektivitas dan efisien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan koneksi internet dan intranet pada 61 OPD (120 titik koneksi) • Menyediakan koneksi free wifi pada 306 desa/kelurahan • Menyediakan pusat data (ruang server) untuk memfasilitasi penempatan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publi • Mengembangkan aplikasi dan basis data layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi • Memfasilitasi IP Publik, penyelenggaraan subdomain OPD, email OPD, dan subdomain desa • Memfasilitasi koordinasi SPBE • Memfasilitasi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112 • Memfasilitasi pemberian rekomendasi perizinan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP) • Penyusunan Masterplan Statistik dan Integrasi Data sektoral • Implementasi penguatan data sektoral berbasis digital • Peningkatan kualitas dan frekuensi data statistik • Penerapan dashboard untuk analisis kebijakan • Pengembangan sistem statistik berbasis blockchain • Pemetaan risiko dan audit keamanan sandi • Penguatan CSIRT Jombangkab • Pengembangan SDM sandi bersertifikasi • Penilaian maturitas keamanan informasi (Indeks KAMI) • Penerapan teknologi keamanan berbasis blockchain • Partisipasi Publik dan Literasi 	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>SPBE, dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE;</p> <p>e. penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik; b. monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik; c. penyusunan strategi komunikasi publik; d. penyusunan konten; e. diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik; f. pelayanan Informasi Publik; g. relasi media; g. kemitraan komunikasi dengan KIM; i. penguatan kapasitas SDM KP; dan h. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi 		<p>Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan Rebranding Komunikasi • Pemerintah 	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Sesuai Dengan Standar Data, Meta data dan Kode Referensi • Menjamin keamanan informasi berklasifikasi, pengamanan komunikasi sandi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat keras/perangkat lunak sandi, jaringan komunikasi sandi, dan aspek pengawasan & evaluasi persandian 			
	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	Transformasi tata kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan publik menuju daya saing daerah yang kompetitif.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pemerintah	

Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan mengacu pada visi dan misi RPJMD yang disandingkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel T-C. 26.			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA			
MISI : 5. Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital	Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik (optimalisasi) penciptaan sistem pemerintahan berbasis elektronik) di seluruh Perangkat Daerah.	Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal sebagai upaya menciptakan budaya kerja dan kualitas kerja yang lebih efektivitas dan efisien.
	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	Meningkatkan kualitas Kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik, baik pada kualitas sumberdaya manusia, kebijakan tata kelola, sarana-prasarana pelayanan, dan sumber daya pendukung yang relevan lainnya.	Transformasi tata kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan publik menuju daya saing daerah yang kompetitif.

BAB IV

PROGAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang berkesinambungan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, maka disusun rencana Program, kegiatan dan Pendanaan yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Kepmen 050-5889 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 - 2029

Kertas Kerja

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Transformasi Birokrasi Berbasis Digital	Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik	Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Terakselelerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik digital	Indeks Layanan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
						Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
						Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
		Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Terakselelerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Terselenggaranya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
					Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat		
						Sub Kegiatan Relasi Media	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	
						Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
		Optimalnya data statistik sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan	Meningkatnya penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Indeks pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standard	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektivitas Tata kelola keamanan informasi	Indeks KAMI	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non-Elektronik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik				Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	3,91	1,90		2,00		2,10		2,20		2,30		2,30		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab.Jombang
	Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah			Indeks Layanan Digital	1,9%	22,60 %		35,80 %		45,3% %		86,80 %		100%		100%		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab.Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				OPD yang memiliki layanan digital x100)															
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	0%	23 %	Rp 24.241.133.000	36%	Rp 19.869.133.000	45%	Rp 13.394.133.000,00	87%	Rp 13.094.133.000,00	100%	Rp 13.094.133.000	100%	Rp 13.094.133.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa (Definisi Operasional : Jumlah domain aktif sesuai standar dibagi jumlah entitas (pmda dan pemdes)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	5 Dokumen	Rp78.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pemerintah Daerah															
		2.16.03.2.02.0013	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	6 Aplikasi	Rp. 8.404.000,00	8 Aplikasi	Rp. 2.154.000,00	10 Aplikasi	Rp1.304.000,00	10 Aplikasi	Rp1.304.000,00	10 Aplikasi	Rp1.304.000,00	5 Aplikasi	Rp1.304.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp472.800,00	1 Dokumen	Rp172.800,00	1 Dokumen	Rp472.800,00	1 Dokumen	Rp172.800,00	1 Dokumen	Rp172.800,00	4 Dokumen	Rp172.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.03.2.02.0020	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	2 aplikasi	Rp2.562.000,00	2 aplikasi	Rp2.562.000,00	2 aplikasi	Rp2.062.000,00	2 aplikasi	Rp2.062.000,00	2 aplikasi	Rp2.062.000,00	8 aplikasi	Rp2.062.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			pemerintah daerah																
		2.16.03.2.02.0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 aplikasi	4 Aplikasi	Rp95.700.000,00	6 Aplikasi	Rp95.700.000,00	8 Aplikasi	Rp95.700.000,00	10 Aplikasi	Rp95.700.000,00	12 Aplikasi	Rp95.700.000,00	12 Aplikasi	Rp95.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.03.2.02.0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	53 Unit	Rp3.075.000.000,00	53 Unit	Rp575.000.000,00	53 Unit	Rp500.000.000,00	53 Unit	Rp500.000.000,00	53 Unit	Rp500.000.000,00	53 Unit	Rp500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.03.2.02.0030	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	Rp7.740.633.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp12.480.633.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp7.130.633.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp7.130.633.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp7.130.633.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp7.130.633.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
	Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100%	100%	Rp 6.858.415.800,00	100%	Rp 6.868.843.800,00	100%	Rp 6.870.349.800,00	100%	Rp 6.891.958.800,00	100%	Rp 6.890.349.800,00	100%	Rp 6.890.349.800,00	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	3	Rp3.650.421.000,00	3	Rp3.650.421.000,00	3	Rp3.650.421.000,00	3	Rp3.650.421.000,00	3	Rp3.650.421.000,00	3	Rp3.650.421.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Loka si
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Definisi Operasional : Jumlah hadir dibagi jumlah undangan)	100%	100%	Rp427.533.300	100%	Rp427.533.300	100%	Rp427.533.300	100%	Rp427.533.300	100%	Rp427.533.300	100%	Rp427.533.300	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Definisi Operasional :Jumlah hadir dibagi jumlah undangan)	100%	100%	Rp2.547.888.600,00	100%	Rp2.558.316.600,00	100%	Rp2.559.822.600,00	100%	Rp2.581.431.600,00	100%	Rp2.579.822.600,00	100%	Rp2.579.822.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Definisi Operasional : jumlah Konten Informasi Publik - Website (Rilis)	2 konten	12 Konten	Rp232.572.900,00	12 konten	Rp232.572.900,00	12 konten	Rp232.572.900,00	12 konten	Rp232.572.900,00	12 konten	Rp232.572.900,00	12 konten	Rp232.572.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				- Medsos (Instagram, Youtube)														Jombang		
	Optimalnya data statistik sektoral			Indeks Pembangunan Statistik	2,49	2,6		2,7		2,8		2,9		3,0		3		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang	
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,49	2,6	Rp 1.774.003.500,00	2,7	Rp 1.599.003.500,00	2,8	Rp 1.599.003.500,00	2,9	Rp 1.599.003.500,00	3,0	Rp 1.599.003.500,00	3	Rp 1.599.003.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	100%	Rp 137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	Rp 500.416.500,00	1 Laporan	Rp325.416.500,00	1 Laporan	Rp325.416.500,00	1 Laporan	Rp325.416.500,00	1 Laporan	Rp325.416.500,00	1 Laporan	Rp325.416.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.20.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	100%	Rp 405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Loka si
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.20.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%	Rp.731.448.000,00	100%	Rp.731.448.000,00	100%	Rp.731.448.000,00	100%	Rp.731.448.000,00	100%	Rp.731.448.000,00	100%	Rp.731.448.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
	Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi			Indeks KAMI	612	690		710		720		730		740		740		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	98	102	Rp 1.028.770.600,00	104	Rp 978.770.600,00	106	Rp 978.770.600,00	108	Rp 978.770.600,00	109	Rp 978.770.600,00	109%	Rp 978.770.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.21.02.2. 01.0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp40.520.00 0,00	1 Dokumen	Rp40.520.00 0,00	1 Dokumen	Rp40.520.00 0,00	1 Dokumen	Rp40.520.00 0,00	1 Dokumen	Rp40.520.00 0,00	1 Dokumen	Rp40.520.00 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.21.02.2. 01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	Rp231.206.4 00,00	1 Laporan	Rp231.206. 400,00	1 Laporan	Rp231.206. 400,00	1 Laporan	Rp231.206. 400,00	1 Laporan	Rp231.206. 400,00	1 Laporan	Rp231.206. 400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.21.02.2. 01.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang	53 Perangkat	53 Perangkat	Rp757.044.2 00,00	53 Perangkat	Rp707.044.2 00,00	53 Perangkat	Rp707.044.2 00,00	53 Perangkat	Rp707.044.2 00,00	53 Perangkat	Rp 707.044.200, 00	53 Perangkat	Rp707.044.2 00,00	Dinas Komunikasi	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	at Daerah	Daerah		Daerah		Daerah		Daerah		Daerah		Daerah		dan Informatika Kab. Jombang	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,07	80,15		80,20		80,25		80,30		80,35		80,35		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79,19	76,50	Rp 7.946.357.611,00	77	Rp 7.943.982.611,00	77,50	Rp 7.943.982.611,00	78	Rp 7.943.982.611,00	78,50	Rp 7.943.982.611,00	78,50	Rp 39.614.624.059,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 Dokumen	Rp 118.585.000	3 Dokumen	Rp 130.443.500,00	3 Dokumen	Rp 143.487.850,00	3 Dokumen	Rp 157.836.635,00	3 Dokumen	Rp 173.620.298,50	3 Dokumen	Rp173.620.298,50	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 Laporan	Rp 41.007.000,00	5 Laporan	Rp 45.107.700,00	5 Laporan	Rp 49.618.470,00	5 Laporan	Rp 54.580.317,00	5 Laporan	Rp 60.038.348,70	5 Laporan	Rp 60.038.348,70	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang	86 data	86 data	Rp 2.375.000,00	86 data	Rp2.375.000,00	86 data	Rp2.375.000,00	86 data	Rp2.375.000,00	86 data	Rp2.375.000,00	86 data	Rp2.375.000,00	Dinas Komunikasi dan	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Loka si
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah														Inform atika Kab. Jomba ng	
		2.16.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	34 orang / bulan	Rp 5.575.119.201,00	34 orang / bulan	Rp 6.132.631.121,10	34 orang / bulan	Rp 6.745.894.233,21	34 orang / bulan	Rp 7.420.483.656,53	34 orang / bulan	Rp 7.420.483.656,53	34 orang / bulan	Rp5.575.119.201,00	Dinas Komunikasi dan Inform atika Kab. Jomba ng	Kab. Jomb ang
		2.16.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp 176.990.000,00	1 dokumen	Rp 194.689.000,00	1 dokumen	Rp 214.157.900,00	1 dokumen	Rp 235.573.690,00	1 dokumen	Rp 176.990.000,00	1 dokumen	Rp176.990.000,00	Dinas Komunikasi dan Inform atika Kab.	Kab. Jomb ang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		Jombang	
		2.16.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	4 Laporan	Rp 4.720.000,00	4 Laporan	Rp 5.192.000,00	4 Laporan	Rp 5.711.200,00	4 Laporan	Rp 6.282.320,00	4 Laporan	Rp 4.720.000,00	4 Laporan	Rp 4.720.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	34 Paket	Rp 20.400.000,00	34 Paket	Rp 22.440.000,00	34 paket	Rp 24.684.000,00	34 paket	Rp 27.152.400,00	34 paket	Rp 29.867.640,00	34 paket	Rp 29.867.640,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	Rp 13.819.800,00	12 paket	Rp 15.201.780,00	12 paket	Rp 16.721.958,00	12 paket	Rp 18.394.153,80	12 paket	Rp 20.233.569,18	12 paket	Rp 20.233.569,18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	Rp 79.717.800,00	12 paket	Rp 87.689.580,00	12 paket	Rp 96.458.538,00	12 paket	Rp 106.104.391,80	12 paket	Rp 116.714.830,04	12 paket	Rp 116.714.830,04	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	12 paket	Rp 258.684.400,00	12 paket	Rp 284.552.840,00	12 paket	Rp 313.008.124,00	12 paket	Rp 344.308.936,00	12 paket	Rp 378.739.830,00	12 paket	Rp 378.739.830,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		atika Kab. Jombang	
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 paket	Rp 52.308.800,00	12 paket	Rp 57.539.680,00	12 paket	Rp 63.293.648,00	12 paket	Rp 69.623.012,80	12 paket	Rp 76.585.314,08	12 paket	Rp52.308.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 dokumen	Rp 12.612.000,00	3 dokumen	Rp 13.873.200,00	3 dokumen	Rp 15.260.520,00	3 dokumen	Rp 16.786.572,00	3 dokumen	Rp 18.465.229,20	3 dokumen	Rp12.612.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 laporan	Rp 195.555.100,00	5 laporan	Rp 215.110.610,00	5 laporan	Rp 236.621.671,00	5 laporan	Rp 260.283.838,10	5 laporan	Rp 286.312.221,91	5 laporan	Rp 286.312.221,91	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp 57.943.810	2 unit	Rp 63.738.191,00	2 unit	Rp 70.112.010,00	2 unit	Rp 77.123.211,11	2 unit	Rp 84.835.532,22	2 unit	Rp 84.835.532,22	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	12 Laporan	Rp 417.720.000,00	12 Laporan	Rp 459.492.000,00	12 Laporan	Rp 505.441.200,00	12 Laporan	Rp 555.985.320,00	12 Laporan	Rp 611.583.852,00	12 Laporan	Rp 417.720.000,00	Dinas Komunikasi dan Inform	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														atika Kab. Jombang	
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 441.699.700,00	12 Laporan	Rp 459.492.000,00	12 Laporan	Rp 505.441.200,00	12 Laporan	Rp 555.985.320,00	12 Laporan	Rp 611.583.852,00	12 Laporan	Rp 611.583.852,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	Rp43.780.000,00	1 unit	Rp48.158.000,00	1 unit	Rp52.973.800	1 unit	Rp58.271.180,00	1 unit	Rp64.098.298,00	1 unit	Rp64.098.298,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kendaraan Dinas Jabatan																
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	19 Unit	Rp204.500.000,00	19 unit	Rp224.950.000,00	19 unit	Rp247.445.000,00	19 unit	Rp272.189.500,00	19 unit	Rp299.408.450,00	19 unit	Rp299.408.450,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2 Unit	2 unit	Rp130.000.000,00	2 unit	Rp143.000.000,00	2 unit	Rp157.300.000,00	2 unit	Rp173.030.000,00	2 unit	Rp190.333.000,00	2 unit	Rp190.333.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	63 Unit	555 unit	Rp98.820.000,00	555 unit	Rp108.702.000,00	555 unit	Rp119.572.200,00	555 unit	Rp131.529.420,00	555 unit	Rp144.682.362,00	555 unit	Rp144.682.362,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Loka si
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa (Definisi Operasional : Jumlah domain aktif sesuai standar dibagi jumlah entitas (pemda dan pemdes)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 86.030.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	1 Dokumen	Rp 78.000.000,00	5 Dokumen	Rp78.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.03.2.02.0013	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	6 Aplikasi	Rp425.000.000,00	8 Aplikasi	Rp500.000.000,00	10 Aplikasi	Rp500.000.000,00	10 Aplikasi	Rp500.000.000,00	10 Aplikasi	Rp500.000.000,00	5 Aplikasi	Rp500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp200.617.800	1 Dokumen	Rp380.975.000,00	1 Dokumen	Rp380.975.000,00	1 Dokumen	Rp380.975.000,00	1 Dokumen	Rp380.975.000,00	4 Dokumen	Rp380.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.03.2.02.0020	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	2 aplikasi	456.000.000,00	2 aplikasi	Rp667.275.000,00	2 aplikasi	Rp667.275.000,00	2 aplikasi	Rp667.275.000,00	2 aplikasi	Rp667.275.000,00	8 aplikasi	Rp667.275.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			pemerintah daerah																
		2.16.03.2.02.0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 aplikasi	4 Aplikasi	Rp0,00	6 Aplikasi	Rp95.700.000,00	8 Aplikasi	Rp95.700.000,00	10 Aplikasi	Rp95.700.000,00	12 Aplikasi	Rp95.700.000,00	12 Aplikasi	Rp95.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.03.2.02.0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	Rp157.708.300,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp1.751.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	53 Unit	Rp497.400.000,00	53 Unit	Rp497.400.000,00	53 Unit	Rp480.225.000,00	53 Unit	Rp480.225.000,00	53 Unit	Rp480.225.000,00	53 Unit	Rp480.225.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.03.2.02.0030	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	Rp1.680.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp2.880.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp2.880.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp2.880.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp2.880.000.000,00	53 Perangkat Daerah	Rp2.880.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
	Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100%	100%	Rp 3.291.190.480,00	100%	Rp 6.299.379.000,00	100%	Rp 6.299.379.000,00	100%	Rp 6.299.379.000,00	100%	Rp 6.299.379.000,00	100%	Rp 28.488.706.480,00	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	3 Laporan Rp2.220.989.200,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	3 Laporan Rp3.229.773.300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.16.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Definisi Operasional : Jumlah hadir dibagi jumlah undangan)	100%	100%	Rp204.453.600,00	100%	Rp388.471.300,00	100%	Rp388.471.300,00	100%	388.471.300,00	100%	Rp388.471.300,00	100%	Rp388.471.300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Definisi Operasional :Jumlah hadir dibagi jumlah undangan)	100%	100%	Rp487.784.930,00	100%	Rp2.444.140.800,00	100%	Rp2.444.140.800,00	100%	2.444.140.800,00	100%	Rp2.444.140.800,00	100%	Rp2.444.140.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Definisi Operasional : jumlah Konten Informasi Publik - Website (Rilis)	2 konten	12 Konten	Rp377.962.750,00	12 konten	Rp236.993.600,00	12 konten	Rp236.993.600,00	12 konten	236.993.600,00	12 konten	Rp236.993.600,00	12 konten	Rp236.993.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				- Medsos (Instagram, Youtube)														Jombang		
	Optimalnya data statistik sektoral			Indeks Pembangunan Statistik	2,49	2,6		2,7		2,8		2,9		3,0		3		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang	
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,49	2,6	Rp 487,689,700.00	2,7	Rp 1.066.203.500,00	2,8	Rp 1.066.203.500,00	2,9	Rp 1.066.203.500,00	3,0	Rp 1.066.203.500,00	3	Rp 4.264.814.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	100%	Rp 76,030,000.00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	100%	Rp137.035.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	Rp 44,869,700	1 Laporan	Rp64.141.500,00	1 Laporan	Rp64.141.500,00	1 Laporan	Rp64.141.500,00	1 Laporan	Rp64.141.500,00	1 Laporan	Rp64.141.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.20.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	100%	Rp 150,155,000	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	100%	Rp405.104.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Loka si
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.20.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%	216.635,000	100%	Rp459.923.000,00	100%	Rp459.923.000,00	100%	Rp459.923.000,00	100%	Rp459.923.000,00	100%	Rp459.923.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
	Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi			Indeks KAMI	612	690		710		720		730		740		740		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	98	102	Rp 197.718.900,00	104	Rp 954.770.600,00	106	Rp 954.770.600,00	108	Rp 954.770.600,00	109	Rp 954.770.600,00	109%	Rp 4.016.801.300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.21.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp10.079.600,00	1 Dokumen	Rp40.520.000,00	1 Dokumen	Rp40.520.000,00	1 Dokumen	Rp40.520.000,00	1 Dokumen	Rp40.520.000,00	1 Dokumen	Rp40.520.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.21.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	Rp97.445.400,00	1 Laporan	Rp231.206.400,00	1 Laporan	Rp231.206.400,00	1 Laporan	Rp231.206.400,00	1 Laporan	Rp231.206.400,00	1 Laporan	Rp231.206.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.21.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang	53 Perangkat	53 Perangkat	Rp90.193.900,00	53 Perangkat	Rp683.044.200,00	53 Perangkat	Rp683.044.200,00	53 Perangkat	Rp683.044.200,00	53 Perangkat	Rp683.044.200,00	53 Perangkat	Rp683.044.200,00	Dinas Komunikasi	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	at Daerah	Daerah		Daerah		Daerah		Daerah		Daerah		Daerah		dan Informatika Kab. Jombang	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,07	85,90		85,95		86		86,05		86,10		86,10		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79,19	76,50	Rp 7.838.693.615,00	77	Rp 7.943.982.611,00	77,50	Rp 7.943.982.611,00	78	Rp 7.943.982.611,00	78,50	Rp 7.943.982.611,00	78,50	Rp 39.614.624.059,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
																			Jombang	
		2.16.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 Dokumen	Rp 20.470.000	3 Dokumen	Rp 118.585.000	3 Dokumen	Rp 118.585.000	3 Dokumen	Rp 118.585.000	3 Dokumen	Rp 118.585.000	3 Dokumen	Rp 118.585.000	Rp 118.585.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
		2.16.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 Laporan	Rp 21.124.000,	5 Laporan	Rp 41.007.000,	5 Laporan	Rp 41.007.000,	5 Laporan	Rp 41.007.000,	5 Laporan	Rp 41.007.000,	5 Laporan	Rp 41.007.000,	Rp 41.007.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang	Kab. Jombang
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang	86 data	86 data	Rp 2.375.000	86 data	Rp 2.375.000	86 data	Rp 2.375.000	86 data	Rp 2.375.000	86 data	Rp 2.375.000	86 data	Rp 2.375.000	Rp 2.375.000	Dinas Komunikasi dan	Kab. Jombang

Keterangan :

Program Tahun 2030 disusun sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, serta merupakan pijakan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030. Penyusunan program ini mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, guna memastikan keterkaitan, konsistensi, dan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	Nilai	4.10	1.9	2.00	2.10	2.20	2.30	Nilai SPBE pada Tahun 2025 tidak dilakukan Penilaian oleh Kemenpan RB Pada Tahun 2026-2030 Perubahan penilaian yaitu SPBE digantikan oleh Pemerintah Digital
2	Indeks Layanan Digital	Nilai	9,4%	22,6%	35,8%	45,3%	86,8%	100,0%	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki layanan digital yang interoperabel dibagi Jumlah OPD yang memiliki layanan digital x 100
3	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% meliputi seluruh pengaduan yang masuk di LAPOR SP4N ditindaklanjuti
4	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disebarluaskan dibagi Jumlah Informasi dan dokumentasi yang tersedia x 100%
5	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	Predikat Nilai Indeks Pembangunan Statistik: 4,2 - 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik < 1,8 Kurang
6	Indeks KAMI	Nilai	640	690	710	720	730	740	Perkiraan Kategori Persentase (%) Perkiraan Skor (dari 918) Baik ≥ 90% ≥ 826 Cukup Baik 70–89% 643 – 825 Kerangka 40–69% 367 – 642 Dasar Tidak Layak < 40% < 367
7	Nilai Reformasi Birokrasi PD	Nilai Indeks	80,10	85,90	85,95	86	86,05	86,10	Predikat Nilai Evaluasi RB : AA = 90-100 A = 80-90 BB = 70-80 B = 60-70 CC = 50-60 C = 30-50 D = 0-30

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	%	9	23	36	45	87	100	jumlah perangkat daerah dengan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi portal layanan digital $\frac{\text{jumlah perangkat daerah dengan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi portal layanan digital}}{\text{jumlah perangkat daerah Kabupaten Jombang}} \times 100\%$
2	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti
3	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu
4	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Poin	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	Nilai EPPS
5	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	Nilai	100	102	104	106	108	109	Nilai Indeks KAMI
6	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,05	76,50	77	77.50	78	78.50	Nilai Evaluasi AKIP

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu tiga tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI, S.STP.,M.KP
Pembina Tingkat I
NIP. 198005281999121001